

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Pengembangan sektor-sektor ekonomi di suatu daerah merupakan bentuk implementasi dari perencanaan pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pemahaman terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi terutama yang terjadi di daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki profil ekonomi yang berbeda baik dari sumber daya alam yang dimilikinya maupun berdasarkan kepadatannya. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teori perencanaan dan pertumbuhan untuk menerangkan adanya bentuk pergeseran sektoral dalam suatu perekonomian.

#### **2.1. Perencanaan**

##### **2.1.1. Definisi Perencanaan Ekonomi**

Perencanaan adalah suatu tehnik atau cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang ditentukan, dirumuskan, dan dilakukan oleh suatu badan perencanaan di tingkat pusat (Arsyad, 1992). Tujuan yang dimaksudkan dapat berupa tujuan sosial, politik, ekonomi, atau militer yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan dapat dijelaskan berdasarkan bentuk atau golongan persoalan yang dihadapi seperti definisi perencanaan yang dikemukakan oleh *Arthur Lewis*. Adapun definisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan yang berhubungan dengan faktor geografis seperti bangunan, letak tempat tinggal, dan posisi suatu persoalan. Model perencanaan seperti

ini yang umumnya disebut sebagai bentuk perencanaan kota. Tujuan dari model perencanaan kota adalah untuk menciptakan lokasi yang memungkinkan bagi manusia untuk mengembangkan berbagai bentuk aktivitasnya.

- 2) Perencanaan yang memiliki arti pada keputusan atas penggunaan dana pemerintah di masa yang akan datang di mana model perencanaan seperti ini meliputi perencanaan untuk keperluan penerimaan dan pengeluaran.
- 3) Ekonomi berencana, yaitu bentuk ekonomi yang menggambarkan setiap unit produksi yang hanya memanfaatkan bahan baku, sumber daya manusia, dan peralatan yang selanjutnya dialokasikan dalam jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perseorangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- 4) Perencanaan merupakan penentuan sasaran produksi oleh pemerintah baik itu yang ditujukan kepada perusahaan milik pemerintah maupun swasta.
- 5) Perencanaan adalah penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan tujuan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya ke berbagai bidang kegiatan perekonomian.
- 6) Perencanaan menggambarkan sasaran yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada badan usaha swasta.

Perencanaan dalam pembangunan memiliki pengertian yang beragam tergantung dari bentuk persoalan yang dihadapi. Definisi dari *Mohammad Hatta* menjelaskan sebagai bentuk penanganan atau pengaturan perekonomian melalui suatu perencanaan yang telah ditetapkan tujuan dan cara pelaksanaannya. Pemahaman perencanaan pembangunan dari *Widjojo Nitisaastro* menjelaskan melalui dua bentuk

pengertian, yaitu penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah pilihan dan cara-cara alternatif yang efisien serta rasional untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, kata kunci perencanaan terletak pada bentuk pemanfaatan sumber-sumber daya yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian di suatu daerah.

### **2.1.2. Fungsi Perencanaan Ekonomi**

Perencanaan ekonomi merupakan suatu alat untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Kadariyah, 1989). Fungsi perencanaan ekonomi ditujukan untuk memberikan pilihan maupun berbagai alternatif pilihan bagi pengambil kebijakan sesuai dengan keperluan atau kepentingan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Berdasarkan fungsinya, fungsi perencanaan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Memberikan suatu pengarahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan.
- 2) Memberikan suatu perkiraan atas potensi-potensi, prospek perkembangan, hambatan, dan resiko yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang.
- 3) Memberikan kesempatan untuk mengadakan sejumlah pilihan terbaik.
- 4) Memberikan ruang untuk melakukan tindakan berupa penyusunan skala prioritas berdasarkan penting atau tidaknya pencapaian tujuan.
- 5) Sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.

### 2.1.3. Ciri-Ciri Perencanaan Ekonomi

Setiap bentuk perencanaan ekonomi dirancang untuk menyesuaikan taraf atau skala prioritas dalam mencapai tujuan berdasarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, pihak perancang kebijakan ekonomi akan memastikan segala suatu yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebijakan telah siap untuk dimanfaatkan atau dijalankan. Penyusunan rencana ekonomi yang dilakukan oleh otorita pemerintahan dituntut untuk memastikan apakah hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang sebelumnya ditetapkan atau tidak. Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri-ciri perencanaan ekonomi dapat diterangkan sebagai berikut (Arsyad, 1993):

- 1) Mencerminkan suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang meyakinkan (*steady social economic growth*) di mana kondisi ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi yang positif.
- 2) Mencerminkan suatu rencana untuk meningkatkan pendapatan dan perubahan struktur ekonomi berupa usaha divesifikasi ekonomi.
- 3) Adanya upaya untuk memperluas output.
- 4) Adanya upaya pemerataan pembangunan yang disebut juga sebagai *distributive justice*.
- 5) Adanya upaya pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- 6) Adanya upaya secara terus menerus untuk menjaga kestabilan ekonomi.
- 7) Adanya usaha yang dilakukan agar kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional.

Ciri lain dari perencanaan ekonomi adalah dampaknya terhadap lingkungan sosial dan ekonomi di mana perencanaan ekonomi tersebut dilakukan. Perencanaan ekonomi memiliki substansi untuk melakukan suatu perubahan dan pergeseran atau transformasi dari suatu kegiatan perekonomian berupa alokasi sumber-sumber daya di suatu daerah. Ekspektasi yang diharapkan oleh pihak perancang kebijakan akan berdampak mengubah pola pikir maupun ekspektasi dari masyarakat.

## **2.2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.2.1. Konsep Umum**

Selama dekade sebelum tahun 2000, perhatian perekonomian dunia terfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan nasional (Todaro, 1997). Kebijakan ekonomi diarahkan menjadi stimulan atau dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Perkembangan seperti ini yang menjadikan indikator pendapatan nasional menjadi indikator untuk menilai kinerja perekonomian di suatu daerah atau menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah. Kontroversi di antara sejumlah penerapan kebijakan pertumbuhan mendorong berkembangnya pemikiran-pemikiran yang secara khusus mengkaji teori pertumbuhan.

Profesor *Simon Kuznets* merupakan salah satu ekonom yang mempelopori pengukuran dan analisis atas sejarah pertumbuhan pendapatan nasional di beberapa negara maju (Todaro, 1997). Menurut *Kuznets*, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas

tersebut ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga makna yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya kenaikan output secara berkesinambungan yang merupakan manifestasi atau perwujudan dari apa yang selanjutnya disebut pertumbuhan ekonomi. Kemampuan dalam menyediakan berbagai jenis barang itu merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) di suatu negara.
- 2) Perkembangan teknologi merupakan dasar atau pra kondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Ini merupakan suatu kondisi yang sangat diperlukan, akan tetapi masih belum mencukupi karena masih membutuhkan faktor-faktor lainnya.
- 3) Untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang ada dalam pengertian teknologi baru, diperlukan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi dengan inovasi sosial tidak akan dapat memberikan dampak yang berarti atau tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Arsyad (1988) menerangkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai bentuk kenaikan Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP) tanpa memandang apakah kenaikan itu dikatakan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau terjadi suatu pergeseran/perubahan struktur perekonomian. Dalam analisisnya, *Kuznets*

mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang dapat ditemukan di hampir semua negara-negara maju, yaitu:

- 1) Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- 2) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang cukup tinggi.
- 3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang cukup tinggi.
- 4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang cukup tinggi.
- 5) Adanya kecenderungan negara-negara mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha memperluas kapasitas kegiatan ekonominya ke negara-negara lain sebagai daerah pemasaran dan sumber perolahan bahan baku baru.
- 6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Menurut *Kuznets*, terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu (Todaro, 1997):

- 1) Akumulasi modal (*Capital Accumulation*), yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- 2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- 3) Kemajuan teknologi (*technological progress*), merupakan sumber pertumbuhan yang cukup penting karena dapat memperbaiki metode cara lama dengan ditemukannya cara-cara baru dalam proses produksi.

### 2.2.2. Konsep di Daerah

Konsep pertumbuhan (*economic growth*) di daerah memiliki pengertian yang identik dengan konsep pertumbuhan ekonomi secara umum (Bendavid-Val, 1992). Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu berdasarkan pendekatan lapangan usaha (*output*) dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Penghitungan pertumbuhan regional didasarkan pada besarnya keseluruhan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga yang berada di daerah selama kurun waktu 1 tahun. Indikator pertumbuhan regional ditunjukkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perbedaan antara konsep pertumbuhan secara umum dan konsep pertumbuhan daerah terletak pada penetapan sasaran dan orientasi pencapaian sasaran (Badrudin, 1999). Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional difokuskan pada bidang-bidang yang dapat menciptakan atau mendorong pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan infrastruktur termasuk sarana maupun pra sarana. Pendekatan sasaran di daerah lebih ditekankan pada aspek yang bersifat sektoral sebagai sumber pendapatan yang strategis untuk keperluan pembiayaan pembangunan. Pendekatan sasaran di daerah seperti ini didorong oleh fakta bahwa tidak semua daerah memiliki potensi ekonomi yang relatif sama atau tidak semua sektor ekonomi dianggap memiliki potensi yang sama.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan besarnya potensi ekonomi secara sektoral yang terdapat di suatu daerah (Kaho, 1997). Indikator ini dapat dipergunakan sebagai pembanding dengan daerah lainnya untuk mengukur keberhasilan pembangunan baik secara total maupun per sektornya. Pada tujuan

tertentu, misalnya untuk mengetahui bagaimana perkembangan masing-masing sektornya, dilakukan perbandingan melalui metode rasio tertentu terhadap indikator nasional seperti yang terdapat pada Produk Domestik Bruto (PDB). Interpretasi untuk menerangkan pada konsep daerah lebih memfokuskan pada pengertian perkembangan sektoral walaupun metode penghitungannya sama dengan konsep secara umum.

### 2.3. Pembangunan Ekonomi

Paham pembangunan atau *developmentalism* merupakan bentuk pandangan terhadap suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan segenap pengorganisasian dan peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Todaro, 1997). Berdasarkan pengertian secara umum, paham pembangunan tidak diartikan atau dikonotasikan dengan segala aspek atau bentuk ekonomi, akan tetapi memiliki makna yang lebih luas. Pada bentuk pemahaman tertentu, konsep *developmentalisme* lebih banyak ditujukan pada aspek yang berbentuk non-ekonomi.

Pada dekade 1970an, konsep *developmentalisme* yang dikemukakan oleh Bank Dunia mendapatkan kritikan karena memiliki pengertian atau pemaknaan yang cukup sempit. Pembangunan sebagai suatu proses harus didefinisikan sebagai upaya untuk menghapuskan berbagai persoalan umat manusia seperti rendahnya ketersediaan nutrisi, penyakit, buta huruf, daerah pemukiman yang kumuh, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Pendapat ini dikemukakan untuk mengoreksi sasaran yang harus dicapai, yaitu dengan memperhatikan bagaimana perkembangan jumlah kesempatan kerja, peningkatan keadilan sosial, dan

pemberantasan kemiskinan. Pemahaman terhadap konsep developmentalisme dilakukan melalui studi maupun pendekatan yang akan dijelaskan pada sub bagian berikut ini.

Ide atau gagasan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada kelemahan konsep pembangunan yang hanya dapat mempertahankan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam jangka pendek (Sitohang, 1991). Pada umumnya, sasaran pembangunan masih berorientasi pada pemberdayaan sumber-sumber ekonomi yang potensial di daerah untuk keperluan pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang. Konsep pemberdayaan masih terbatas pada penyerapan potensi sumber-sumber ekonomi yang selanjutnya berdampak pada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya. Persoalan dalam konsep pembangunan konvensional adalah tidak memperhatikan bagaimana kepentingan pembangunan di masa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa mendatang (Adiatmojo, 2003). Substansi pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* terletak pada kepentingan dari orientasi kebijakan pembangunan yang tidak hanya melihat pencapaian orientasi jangka pendek, akan tetapi bagaimana orientasi jangka pendek dapat memberikan langkah bagi keberlangsungannya di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, pembangunan berkelanjutan memiliki dua gagasan utama, yaitu:

1) **Gagasan Kebutuhan**

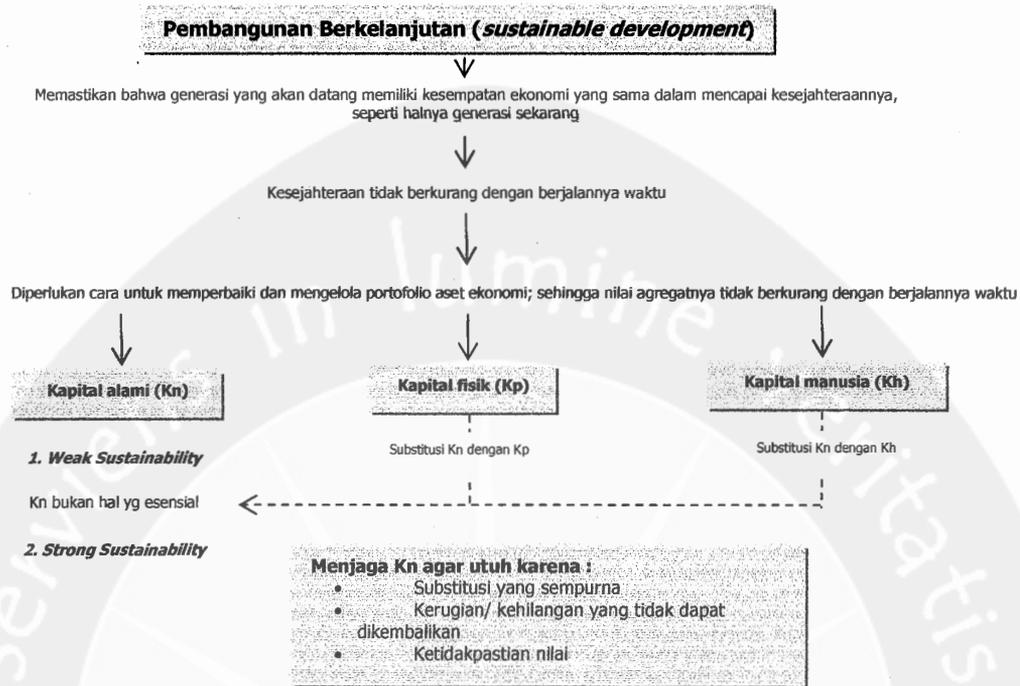
yaitu kebutuhan esensial yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia di masa yang akan datang.

2) **Gagasan Keterbatasan**

yaitu penciptaan suatu kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya dan politik, keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Prinsip dasar yang dipergunakan untuk melaksanakan pencapaian tujuan meliputi pemerataan, partisipasi keanekaragaman (*diversity*), integrasi, dan perspektif jangka panjang (Adiatmojo, 2003). Indikasi untuk melihat pelaksanaan tersebut dapat ditunjukkan melalui dimensi waktu di mana pemanfaatan sumberdaya dapat dikatakan berkelanjutan jika mencapai lebih dari 10 hingga 20 tahun. Tujuan yang paling esensial pada konsep pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada upaya untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang memiliki kesempatan ekonomi yang sama dalam mencapai kesejahteraannya, seperti halnya generasi sekarang.

Upaya untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan cara pengelolaan dengan memperbaiki portofolio aset ekonomi sehingga nilai agregatnya tidak berkurang selama perjalanan waktu. Portofolio aset ekonomi tersebut meliputi kapital alami (Kn), kapital fisik (Kp), dan kapital manusia (Kh). Secara sistematis, konsep pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan melalui Gambar 2.1 berikut ini.



Sumber: Adiatmojo (2003)

**Gambar 2.1**  
**Diagram Perencanaan Sumberdaya Alam dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam paradigma ekonomi, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pemeliharaan kapital (Prihatini, 2001). Suatu pembangunan dikatakan dapat memiliki keberlanjutan/kesinambungan jika memiliki suatu persyaratan minimum, yaitu terdapat persediaan kapital alami (*natural capital stock*) yang harus dipertahankan sehingga kuantitas maupun kualitasnya tidak mengalami penurunan sepanjang waktu. Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bentuk *natural capital* merupakan suatu proses substraksi atau penambahan materi yang berasal dari alam dan ditujukan pula untuk alam. Proses ini selanjutnya akan menyebabkan perubahan ke dalam setiap komponen sistem alam tersebut yang berakibat pada perubahan

kondisi alam dari sumberdaya yang dikelola. Berdasarkan pengertian ini, terdapat empat variasi kebijakan, yaitu (Adiatmojo, 2003):

- 1) Kestinambungan yang sangat lemah (*very weak sustainability*) atau "*Hartwick-Solow sustainability*", yang hanya mensyaratkan kapital dasar total yang harus dipelihara. Kestinambungan ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa tingkat/ laju konsumsi berada di bawah *Hicksian income*, dimana *Hicksian income* ini didefinisikan sebagai tingkat konsumsi maksimum yang dapat membangun kondisi masyarakat yang lebih sejahtera di akhir periode pembangunan dibandingkan dengan kondisi awalnya. Diasumsikan *natural capital* dapat disubsitusi dengan kapital buatan manusia (*man-made capital*) tanpa batas. Dengan kata lain, deplesi sumberdaya alam tidak diperhitungkan dalam penilaian kegiatan ekonomi.
- 2) Kestinambungan yang lemah (*weak sustainability*), mensyaratkan pemeliharaan kapital total, dengan kendala bahwa modal alami yang penting (*critical natural capital*) harus dilestarikan. Misalnya : bila sumberdaya air dan keragaman spesies merupakan hal yang penting bagi stabilitas ekosistem, sumberdaya tersebut tidak dapat dikorbankan bagi alasan-alasan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kestinambungan yang kuat (*strong sustainability*) mensyaratkan bahwa tidak ada substitusi bagi modal alami (*natural capital*), karena *natural capital* ini memperkuat kesejahteraan manusia dan degradasi *natural capital* tersebut dapat dikembalikan kondisinya ke kondisi awal. Kestinambungan yang kuat

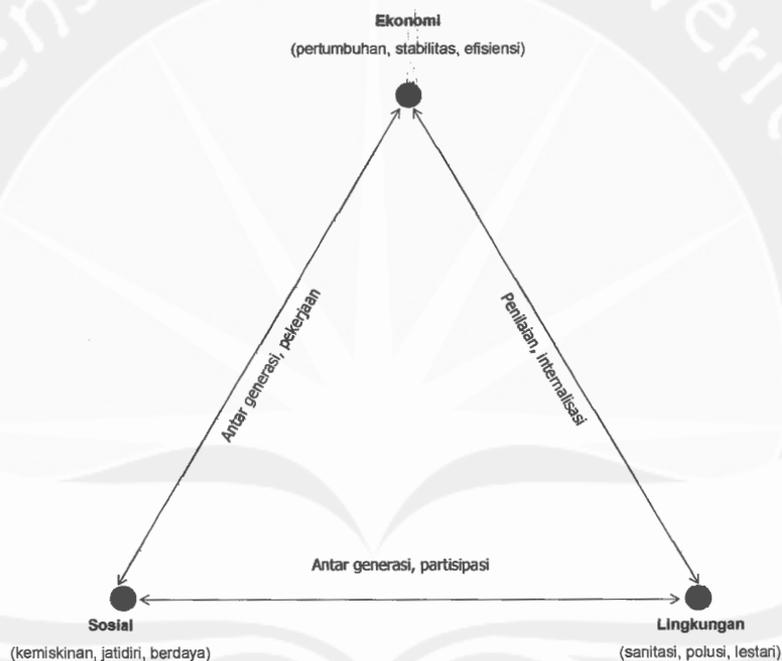
mensyaratkan pemeliharaan kapital total, dengan kendala bahwa agregat kapital total harus dilestarikan

- 4) Kesenambungan yang sangat kuat (*very strong sustainability*) mensyaratkan bahwa kesenambungan sistem ekologi adalah esensi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan yang bergantung pada sumberdaya (*resource-dependent "development"*) diperbolehkan, namun demikian, pertumbuhan yang bergantung pada sumberdaya (*resources-dependent "growth"*) tidak dapat dibenarkan. Interpretasi ini mensyaratkan pemisahan setiap komponen dari *natural capital*. Pada kenyataannya, *very strong sustainability* lebih merupakan sistem daripada suatu konsep ekonomi.

Paradigman dalam konsep pembangunan berkelanjutan membagi pengertian sumberdaya alam menjadi dua pengertian, yaitu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (Adiatmojo, 2003). Perbedaan pengertian ini ditujukan untuk kepentingan orientasi pencapaian kebijakan ekonomi dan penetapan perencanaan perekonomian. Sumberdaya yang tak pulih adalah sumberdaya yang laju pemulihannya sangat lambat sehingga sumberdaya tersebut tidak dapat memulihkan stok/sediaannya dalam waktu yang ekonomis (Prihatini, 2001). Tanpa daur ulang pemanfaatannya, sumberdaya tak pulih akan habis bila dimanfaatkan.

Pada pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, terdapat 3 (tiga) pilar tujuan (Daniel M, 2003), yaitu : pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi. Pada pilar kedua pembangunan sosial yang bertujuan pengentasan

kemiskinan, pengakuan jati diri dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pilar kedua pembangunan lingkungan yang berorientasi pada perbaikan lingkungan lokal seperti sanitasi lingkungan, industri yang lebih bersih dan rendah emisi, dan kelestarian sumberdaya alam. Dalam konteks tiga pilar pembangunan berkelanjutan dengan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.



Sumber: Prihatini (2001)

**Gambar 2.2**  
**Pilar Pembangunan Berkelanjutan**

#### 2.4. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Konsep pembangunan di daerah memiliki perbedaan terutama dalam pencapaian sasaran pada periode jangka pendek dengan konsep pembangunan secara nasional (Sitohang, 1991). Pada pengertian jangka panjang, konsep secara nasional

mungkin telah dikatakan memasuki pada tahap tinggal landas. Pada konsep daerah, terdapat kemungkinan masih berada pada taraf masyarakat tradisional. Dalam pelaksanaannya, perbedaan konsep seperti ini akan berdampak pada perbedaan pada prioritas sasaran dalam jangka pendek. Untuk menerangkan konsep daerah, akan dijelaskan dengan menggunakan dua pengertian, yaitu daerah homogen dan daerah nodal.

1) Konsep Daerah Homogen (*Homogeneous Region*)

Konsep daerah homogen memandang daerah sebagai suatu wilayah tata ruang atau suatu daerah geografis yang dapat dihubungkan pengertiannya menjadi suatu daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri yang dianggap seragam. Ciri-ciri ini dapat bersifat ekonomi seperti memiliki kesamaan atas struktur produksi dan keserupaan dalam pola konsumsi atau pola konsumsi yang homogen. Aspek geografis yang dimaksudkan dapat berbentuk pengertian topografi atau iklim.

2) Konsep Daerah Nodal (*Popularized Region*)

Konsep daerah nodal atau daerah berkutub memandang daerah dari sisi satuan-satuan yang heterogen seperti distribusi penduduk yang mengakibatkan adanya kota-kota besar dan desa atau kemunculan suatu hirarki pemukiman di mana terdapat hubungan atau keterkaitan satu sama lainnya secara fungsional.

Sifat khas dari konsep daerah ini terletak pada kaitan antara pusat dan daerah.

Pada umumnya, konsep daerah nodal banyak diterapkan di suatu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman sumberdaya alam yang tinggi atau setidaknya memiliki luas wilayah dan karakteristik populasi yang beranekaragam (Sitohang,

1991). Dalam pelaksanaannya, penerapan kedua konsep pembangunan baik konsep daerah homogen maupun konsep daerah nodal ditentukan berdasarkan orientasi kebijakan ekonomi dan bentuk permasalahan yang dihadapi.

### **2.5. Konsep Keunggulan Komparatif Daerah**

Kebijakan pembangunan merumuskan tujuan yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang (Kaho, 1997). Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran dari perencanaan pembangunan di daerah untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, pertumbuhan ekonomi dapat mengalami kenaikan atau mungkin mengalami penurunan sesuai dengan banyaknya sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Sektor-sektor tersebut mempunyai potensi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan daerah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Konsep keunggulan komparatif dalam perumusan perencanaan pembangunan di daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor dalam perekonomian yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang dianggap memiliki keunggulan komparatif akan diperhatikan dan dikembangkan agar pertumbuhannya dapat memberikan dampak bagi pengembangan perekonomian secara keseluruhan.

Metode yang paling umum digunakan adalah dengan melakukan perbandingan antara besarnya kapasitas ekonomi dari masing-masing sektor ekonomi

di daerah dan besarnya kapasitas ekonomi dari masing-masing sektor ekonomi secara nasional. Metode lain yang juga populer diterapkan adalah memperhatikan terjadinya pergeseran sektoral dari masing-masing sektor ekonomi di daerah dengan masing-masing sektor-sektor ekonomi secara nasional. Kedua metode ini dianggap lebih obyektif pada penyampaian informasi daripada melakukan perbandingan di antara sektor-sektor ekonomi daerah. Identifikasi sumber-sumber ekonomi potensial yang tepat akan menentukan bagaimana keberhasilan program pembangunan di daerah dalam mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan.

## **2.6. Perubahan Struktur dan Pola Pembangunan Ekonomi**

Fokus dari teori perubahan struktur adalah mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara terbelakang dapat mentransformasikan struktur perekonomian subsisten (tradisional) ke dalam bentuk perekonomian yang lebih moderen. Tema pembangunan moderen saat ini memperhatikan bagaimana bentuk atau pola perubahan struktural yang diharapkan dapat memberikan indikasi bagi penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi. Gambaran pencapaian tujuan seperti yang dimaksudkan pada tema perubahan struktural ditunjukkan dengan tercapainya pembentukan struktur perekonomian moderen berupa industrialisasi baik pada bentuk manufaktur maupun jasa.

Todaro (1997) menerangkan bahwa pemahaman mengenai perubahan struktural memerlukan pengertian yang meyakinkan tentang konsep-konsep sektor primer, sekunder, dan tersier. Ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan pengertian dalam konteks perencanaan maupun distribusi ekonomi. Sektor primer akan

menyediakan kebutuhan yang dapat memberikan kelangsungan bagi sektor sekunder maupun tersier seperti pada penyediaan pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Keberlangsungan sektor sekunder maupun tersier juga memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan sektor primer seperti dalam menyediakan bahan baku produksi. Perubahan struktur yang diharapkan adalah terjadinya suatu proses dari bentuk ekonomi tradisional menjadi perekonomian moderen, perekonomian lemah menuju perekonomian yang kuat, bentuk subsisten menjadi ekonomi pasar, dan terciptanya kemandirian yang berawal dari bentuk ketergantungan. Perubahan struktur dalam perekonomian memerlukan adanya kegiatan pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Pada umumnya, para analis perubahan struktural yang berhaluan empiris selalu menekankan adanya kendala-kendala pembangunan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang bersumber dari lingkungan internasional (Todaro, 1997).

Kendala pembangunan yang berasal dalam negeri antara lain adalah:

- 1) Keterbatasan kepemilikan ekonomi seperti sumberdaya alam dan besarnya penduduk.
- 2) Keterbatasan kelembagaan (institusional) seperti lemahnya mekanisme perumusan kebijakan dan kurang jelasnya sasaran pemerintah.

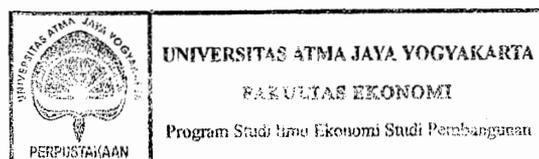
Kendala-kendala yang bersumber dari lingkungan internasional terhadap pelaksanaan proses pembangunan adalah kelangkaan akses atau saluran bagi negara yang bersangkutan untuk mendapatkan modal dan teknologi moderen dari luar negeri, serta tuntutan untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat dalam perdagangan

internasional. Perbedaan tingkat kemajuan pembangunan di antara sesama negara berkembang juga dapat dianggap sebagai kendala.

Model perubahan struktural yang paling populer adalah model yang disusun oleh *Hollis B. Chenery*, yaitu seorang ekonomi dari *Harvard University*. Perumusan model perubahan struktural dari *Chenery* dilakukan berdasarkan serangkaian riset empiris yang secara khusus mengamati pola-pola pembangunan di sejumlah negara Dunia Ketiga selama kurun waktu Perang Dunia Kedua. Temuan yang diperoleh oleh *Chenery* adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan keberhasilan dari adanya pergeseran struktural, yaitu (Todaro, 1997):

- 1) Kelancaran transisi dari pola perekonomian agraris ke perekonomian industri
- 2) Kesenambungan akumulasi modal fisik dan manusia
- 3) Perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok ke berbagai macam barang dan jasa
- 4) Perkembangan daerah perkotaan terutama pusat-pusat industri berkat migrasi para pencari kerja dari daerah pedesaan dan kota-kota kecil
- 5) Pengurangan jumlah anggota dalam setiap keluarga dan kenaikan populasi karena anak sudah tidak dipandang lagi sebagai salah satu faktor penunjang ekonomi keluarga sehingga para orang tua menjadi lebih mendahulukan kualitas melalui pendidikan.

Perubahan yang terjadi dalam suatu struktur ekonomi memiliki keterkaitan dengan adanya perkembangan tingkat pendapatan (Lincoln, 1992). Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara-negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, meningkatnya pendapatan akan mendorong adanya pergeseran pada



komposisi produk nasional yang berasal dari perubahan di antara kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier. Kesempatan kerja produktif juga mengalami pergeseran dari lingkungan sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Hal ini juga termasuk pergeseran pola perdagangan dari komoditi primer ke barang-barang manufaktur dan jasa.

## **2.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **2.7.1. Konsep dan Definisi**

Suatu daerah memerlukan suatu indikator atau alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di daerahnya (Badrudin, 1999). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi perekonomian suatu daerah dari berbagai tinjauan sektor/aktivitas perekonomian. Konsep yang dimaksudkan adalah pendapatan regional, yaitu suatu bentuk pengkajian berupa deretan angka yang dipergunakan sebagai indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi regional atau daerah (Kaho, 1997). Konsep yang dipergunakan dalam penghitungan pendapatan regional adalah konsep domestik, yaitu nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai sektor yang melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan konsep yang menghitung besarnya balas jasa atau pendapatan kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Pada prinsipnya, pendefinisian dari PDRB memiliki kesamaan dengan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) (Kaho, 1997). Perbedaannya terletak pada sasaran-

sasaran yang ingin dicapai serta orientasi pencapain sarannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendefinisian atas PDRB dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu (Bedavid-Val, 1992):

1) Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pada pendekatan produksi, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun.

2) Pendekatatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut atau berpartisipasi dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu 1 tahun. Balas jasa yang dimaksud adalah gaji atau upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah pengeluaran oleh rumah tangga, lembaga swasta yang tidak berorientasi pada keuntungan dan pemerintah sebagai konsumsi, pengeluaran untuk membentuk modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor bersih di suatu daerah dalam jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan ketiga pendekatan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran dalam berbagai kepentingan akan sama dengan jumlah produk akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, dan akan sama pula dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi. Indikator lain yang

dikembangkan dari definisi tersebut adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, yaitu besarnya PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu.

### **2.7.2. Klasifikasi Lapangan Usaha**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seperti halnya PDB dibentuk oleh berbagai sektor yang mendeskripsikan berbagai aktivitas/kegiatan ekonomi (Kaho, 1997). Adapun aktivitas-aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 9 klasifikasi lapangan usaha, yaitu:

- 1) Sektor Pertanian
- 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian
- 3) Sektor Industri Pengolahan
- 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
- 5) Sektor Bangunan
- 6) Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel
- 7) Sektor Transportasi dan Komunikasi
- 8) Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
- 9) Sektor Jasa-jasa

Pada penghitungannya, PDRB dibedakan pula besarnya berdasarkan adanya faktor perubahan harga, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Hal ini dikarenakan fluktuasi harga dapat mempengaruhi interpretasi atas nilai terutama jika terjadi perbedaan dalam skala waktu. Penetapan tahun dasar dilakukan untuk mengurangi adanya perbedaan nilai yang digunakan dalam menginterpretasikan

besarnya perubahan PDRB dari masa ke masa. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu.

## 2.8. Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan

Pada sub bagian terdahulu telah diterangkan bahwa perencanaan pembangunan terutama pada konteks regional/daerah dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang dianggap memiliki potensi ekonomi yang cukup besar baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang (Kaho, 1997). Metode analisis *shift-share* merupakan metode untuk mengetahui potensi relatif dari suatu sektor atau lapangan usaha dengan melakukan perbandingan antara perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor atau lapangan usaha di daerah yang diamati dengan wilayah nasional (Tarigan, 2004: 79). Dalam metode ini, akan dijelaskan penyebab terjadinya perubahan atas beberapa variabel yang diamati dengan menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetap dalam kaitannya dengan ekonomi nasional.

Analisis *location quotient* (kuosien lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan mengenai besarnya peranan suatu sektor atau lapangan usaha di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau lapangan usaha tersebut secara nasional

(Tarigan, 2004: 78-79). Metode ini dapat pula dipergunakan untuk mengukur seberapa besar suatu sektor dalam suatu perekonomian di daerah/wilayah dapat menjadi basis kegiatan ekonomi di daerah itu sendiri. Konsep analisis ini dianggap cukup sederhana dan mudah diterapkan karena hanya memanfaatkan informasi dari data PDRB untuk diperoleh nilai prosentase distribusi dari masing-masing sektor atau lapangan usaha.

Teknik dalam metode *location quotient* diperhitungkan sebagai perbandingan antara distribusi berupa prosentase dari sektor-sektor perekonomian di suatu daerah dan distribusi berupa prosentase dari sektor-sektor perekonomian secara nasional (Tarigan, 2004: 78-79). Rumus untuk menghitung nilai LQ diterangkan sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PDB}}$$

di mana:

$LQ_i$  = nilai LQ untuk sektor i di Propinsi Kalimantan Barat

$x_i$  = nilai PDRB sektor i di Propinsi Kalimantan Barat

PDRB = total nilai PDRB di Propinsi Kalimantan Barat

$X_i$  = total nilai PDB untuk sektor i

PDB = total nilai PDB.

Rumus LQ di atas dipergunakan untuk menghitung hasil perbandingan antara distribusi masing-masing sektor di daerah dan distribusi masing-masing sektor secara nasional (Adiatmojo, 2003: 15-16). Untuk menerangkan nilai LQ diperlukan kriteria atau klasifikasi yang dapat menyatakan arti dari nilai yang ditunjukkan sebagai informasi atas gambaran potensi ekonomi di suatu daerah. Adapun kriteria atau

klasifikasi untuk menerangkan nilai LQ adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004: 78-79):

1)  $LQ > 1$ ,

Menunjukkan peranan sektor tersebut di daerah lebih besar daripada peranan sektor itu secara nasional. Hal ini menunjukkan adanya surplus sumberdaya yang terdapat pada sektor tersebut atau memiliki kemampuan dalam mengekspor surplus ke daerah lain atau ke luar negeri karena adanya kemampuan dalam menghasilkan produk tersebut secara lebih murah dan lebih efisien. Namun, ini tidak menjadi suatu pentunjuk secara langsung bahwa daerah tersebut dikatakan memiliki keunggulan komparatif untuk sektor  $i$  yang dimaksud.

2)  $LQ < 1$ ,

Menunjukkan bahwa peranan sektor  $i$  di daerah lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Dalam hal ini, sektor  $i$  yang dimaksud tidak mampu memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan diri karena ketidakunggulan dalam aspek sumberdaya sehingga menyebabkan biaya untuk penyelenggaraan produksi menjadi lebih mahal. Jika diperoleh nilai LQ kurang dari satu, maka terdapat sedikit kesempatan bagi sektor  $i$  yang dimaksud dapat dijadikan basis perekonomian di daerah tersebut.

Metode analisis LQ dapat digunakan atau sangat relevan untuk mengamati keunggulan komparatif bagi sektor-sektor atau lapangan usaha yang telah lama berkembang di suatu daerah (Tarigan, 2004: 78). Jika terdapat kegiatan-kegiatan dalam sektor perekonomian yang baru berkembang, maka metode analisis LQ tidak

dapat atau kurang relevan digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Keunggulan metode analisis LQ adalah kesederhanaannya terutama untuk bentuk analisis satu sasaran (*one shot analysis*) seperti untuk mengetahui apakah LQ berada di atas 1 atau tidak.

Metode lain yang diterapkan dalam penelitian adalah metode yang dikembangkan dari konsep pengukuran LQ, yaitu *Dynamic Location Quotient* (DLQ) (Yuwono, 1999: 4-6). Prinsip DLQ masih sama seperti LQ, akan tetapi lebih memfokuskan introduksi laju pertumbuhan yang digunakan sebagai asumsi bahwa setiap nilai tambah pada aspek sektoral maupun PDRB memiliki rata-rata laju pertumbuhan per tahun yang terpisah selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t). Pembentukan rumus DLQ dituliskan sebagai berikut:

$$LQ = \left\{ \frac{X_{ino} (1 + g_{in})^t / Y_{ino} (1 + g_n)^t}{X_{io} (1 + G_i)^t / Y_o (1 + G)^t} \right\}$$

di mana:

- $X_{ino}$  : nilai tambah sektor i di daerah (n) pada tahun (0)
- $X_{io}$  : nilai tambah sektor i secara nasional pada tahun (0)
- $g_{in}$  : rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah (n)
- $G_i$  : rata-rata laju pertumbuhan sektor i secara nasional
- $Y_{no}$  : PDRB di daerah (n) pada tahun (0)
- $Y_o$  : PDB pada tahun (0)
- $g_n$  : rata-rata pertumbuhan PDRB di daerah (n)
- $G$  : rata-rata pertumbuhan PDB

Rumus di atas dituliskan ulang dari rumus LQ. Jika diasumsikan bawa  $X_{ino}/Y_{no} = X_{io}/Y_o$ , maka akan terbentuk rumus DLQ yang dituliskan sebagai berikut:

$$DLQ = \left\{ \frac{(1+g_i)/(1+g_n)}{(1+G_i)/(1+G)} \right\}^t$$

Kondisi untuk DLQ dapat dikategorikan menjadi tiga kemungkinan, yaitu:

1)  $DLQ = 1$

Proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB di daerah (n) sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB daerah himpunan.

2)  $DLQ < 1$

Proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan daerah (n) lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya. Dalam hal ini, selama keadaan masih seperti yang terlihat saat ini, maka di masa yang akan datang, sektor (i) di daerah (n) akan kalah bersaing dengan sektor (i) di daerah lain dalam wilayah daerah himpunan. Demikian sebaliknya.

Beberapa pengamatan menyatakan metode ini sebagai *industrial mix analysis* karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, dalam pengamatan ini akan diketahui apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat di mana industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak. Analisis *shift-share* dapat menggunakan variabel output di mana data yang dipergunakan adalah data dalam bentuk nilai konstan maupun nilai riil berdasarkan tahun dasar tertentu. Pertambahan output regional total ( $\Delta E$ ) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share*. Komponen *share* sering pula

disebut komponen *national share* (N) yang menyatakan banyaknya pertambahan output regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode pengamatan. Hal ini terutama dapat dimanfaatkan untuk melihat kriteria bagi daerah yang diamati untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan nasional.

Komponen *shift* adalah bentuk penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan output regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan bernilai negatif untuk daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan output secara nasional (Tarigan, 2004: 79-80). Bagi setiap daerah, *shift netto* dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component* (P) dan *differential shift component* (D). *Proportional shift component* (P) atau dikenal sebagai komponen struktural atau *industrial mix*, mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini dapat bernilai positif untuk daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh lebih cepat dan bernilai negatif untuk daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau mengalami penurunan.

*Differential shift component* (D) atau disebut juga sebagai komponen lokasional atau regional menyatakan sisa kelebihan yang mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang diamati daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional internal (Tarigan, 2004: 80-81). Suatu

daerah yang memiliki keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah atau efisien, akan memiliki nilai *differential shift component* yang positif. Sedangkan untuk daerah yang secara lokasional dikatakan tidak menguntungkan apabila memiliki *differential shift component* yang negatif.

Kedua komponen *shift* ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan yang bersifat internal. *Proportional shift* adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar output secara nasional. Sedangkan, *differential shift* adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor output khusus di daerah yang diamati. Dengan menggunakan notasi aljabar seperti yang dijelaskan di bawah ini, pembentukan hubungan di antara komponen dapat dikemukakan melalui persamaan berikut ini (Tarigan, 2004: 80-81):

$$\Delta E_r = E_{r,t} - E_{r,t-n} \dots\dots\dots (1.1)$$

di mana:

- E = menyatakan banyaknya lapangan output
- $\Delta$  = notasi pertambahan, yaitu tahun akhir (t) dikurangi dengan angka tahun sebelumnya (t-n)
- r = menyatakan wilayah (*region*)
- t = tahun pengamatan
- t-n = tahun awal.

Persamaan (1.1) diartikan sebagai pertambahan output wilayah/regional, yaitu banyaknya output pada tahun akhir (t) dikurangi dengan jumlah output pada tahun awal (t-n). Persamaan tersebut dapat berlaku untuk total output di wilayah tersebut di mana secara per sektor dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta E_{r,i} = E_{r,i,t} - E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.2)$$

di mana:

$E$  = menyatakan banyaknya output.

$\Delta$  = notasi pertambahan, yaitu tahun akhir (t) dikurangi dengan angka tahun sebelumnya (t-n)

$r$  = menyatakan wilayah (*region*)

$t$  = tahun pengamatan

$t-n$  = tahun awal

$i$  = sektor industri.

Persamaan (1.2) diartikan sebagai pertambahan output regional untuk sektor  $i$ , yaitu jumlah output sektor  $i$  pada tahun akhir (t) dikurangi dengan output sektor  $i$  pada tahun awal (t-n).

Pertambahan output regional untuk sektor  $i$  dapat dijabarkan atas pengaruh dari *national share* (Ns), *proportional share* (P), dan *differential shift* (D). Persamaan dalam notasi aljabar dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta E_{r,i,t} = (Ns_i + P_{r,i} + D_{r,i}) \dots\dots\dots (1.3)$$

di mana:

$t$  = menyatakan tahun

$Ns$  = *national share*

$P$  = *proportional share*

$D$  = *differential shift*.

Pada persamaan (1.3), peranan *national share* (Ns) dianggap memiliki pertambahan output regional sektor  $i$  yang sama dengan proporsi pertambahan output nasional secara rata-rata. Hal ini dapat pula dituliskan sebagai berikut:

$$Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} \cdot \left( \frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.4)$$

di mana:

$N_s$  = *national share*

$E$  = banyaknya output.

$N$  = menyatakan wilayah nasional (*national*) atau wilayah yang strukturnya lebih tinggi dari wilayah pengamatan

$r$  = menyatakan wilayah yang diamati

$i$  = menyatakan sektor / lapangan usaha (industri)

$t$  = menyatakan tahun pengamatan

$t-n$  = menyatakan tahun awal (sebelumnya).

*Proportional share* (P) dihitung dengan melihat pengaruh sektor  $i$  secara nasional terhadap pertumbuhan output sektor  $I$  pada region atau daerah yang diamati. Hal ini dapat pula dituliskan sebagai berikut:

$$P_{r,i,t} = \left\{ \left( \frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - \left( \frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \right\} \times E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.5)$$

di mana:

$P$  = *proportional share*

$E$  = banyaknya output.

$N$  = menyatakan wilayah nasional (*national*) atau wilayah yang strukturnya lebih tinggi dari wilayah pengamatan

$r$  = menyatakan wilayah yang diamati

$i$  = menyatakan sektor / lapangan usaha (industri)

$t$  = menyatakan tahun pengamatan

$t-n$  = menyatakan tahun awal (sebelumnya).

Hasil yang sama juga dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$P_{r,i,t} = \left( \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \times E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.6)$$

*Differential shift* (D) menggambarkan adanya penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di wilayah/daerah yang diamati terhadap pertumbuhan sektor i secara nasional (Tarigan, 2004: 82-83). Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$D_{r,i,t} = \left\{ E_{r,i,t} - \left( \frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) \times E_{r,i,t-n} \right\} \dots \dots \dots (1.7)$$

di mana:

D = *differential shift*

E = banyaknya output.

N = menyatakan wilayah nasional (*national*) atau wilayah yang strukturnya lebih tinggi dari wilayah pengamatan

r = menyatakan wilayah yang diamati

i = menyatakan sektor / lapangan usaha (industri)

t = menyatakan tahun pengamatan

t-n = menyatakan tahun awal (sebelumnya).

Hasil yang sama juga dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$D_{r,i,t} = \left( \frac{\Delta E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) \times E_{r,i,t-n} \dots \dots \dots (1.8)$$

Perlu diketahui bahwa apabila hendak melihat pengaruh dari masing-masing sektor atau lapangan usaha terhadap seluruh wilayah yang dianalisis, maka angka untuk masing-masing sektor harus ditambahkan di mana rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta E_r = (N_s + P_r + D_r) \dots \dots \dots (1.9)$$

di mana:

$$N_s = \sum_{t=1}^n \left( E_{r,i,t-n} \times \left( \frac{E_{N,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n} \right)$$

$$P_{r,t} = \sum_{t=1}^n \left[ \left\{ \left( \frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - \left( \frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \right\} \times E_{r,i,t-n} \right]$$

$$D_{r,t} = \sum_{t=1}^n \left[ \left\{ E_{r,i,t} - \left( \frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n} \right\} \right]$$

Persamaan (1.9) dijelaskan bahwa besarnya nilai *shift-share* ditunjukkan sebagai total nilai komponen *national share*, *proportional-shift*, dan *differential-shift* dari masing-masing sektor.